

Strategi Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga Berencana Di Kota Makassar

Susilawati

Universitas Indonesia Timur

Email : susilawati.uchy@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Makassar dijalankan oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah melaksanakan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan program KB. Selain itu, meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan program KB dan keluarga sejahtera serta meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk membangun keluarga kecil yang berkualitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Strategi Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat mengikuti program keluarga berencana di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu penulis ingin menggambarkan, mengamati strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program keluarga berencana di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program yaitu aspek sosialisasi sudah cukup efektif jika dilihat dari hasil jumlah peserta ikut keluarga berencana aktif dan pengendalian penduduk sudah cukup efektif jika dilihat dari hasil jumlah peserta ikut aktif berKB.

Kata kunci : Strategi; partisipasi masyarakat; keluarga berencana

PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindari dan menjadi salah satu perkara yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk terus diatasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, dijelaskan juga dalam Undang- undang tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah usaha terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai jumlah populasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.

Laju pertumbuhan penduduk (*Growth Rate*) ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) dan tingkat kematian kasar (*Crude Death Rate*) masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun.

Secara garis besar ada tiga aspek permasalahan pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013). Hal ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan. Masih besarnya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk Indonesia di beberapa provinsi merupakan masalah inti yang dihadapi saat ini.

Peningkatan jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan kemiskinan di masa depan karena tekanan pada sumber informasi lainnya langka seperti energi, atau akan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global (Nuraeni, Amirulloh, and Meigawati 2021) Di sisi lain meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah.

Penduduk menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warganegara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu / jangka waktu tertentu. Penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan, fokus perhatian demografi adalah perubahan beserta komposisi dan distribusi penduduk. Dinamika penduduk yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus menerus yang mempengaruhi jumlah. Dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk dipengaruhi beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, perpindahan penduduk serta kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan penduduk secara implisif menyatakan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk secara parsial maupun keseluruhan sebagai akibat perubahan komponen utama perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Tahapan transisi demografi, yaitu: pratransi (pre-transitional), transisi (transitional), dan pasca transisi (past transitional). Adapun peledakan penduduk berdampak tidak berhasil terhadap kondisi kependudukan di Indonesia, yaitu kemiskinan meningkat, kualitas penduduk rendah, pengangguran meningkat, kebutuhan energi meningkat, dan kebutuhan akan pangan meningkat.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Sulawesi Selatan sebanyak 8.034,8 jiwa, lalu tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 9.073,5 Jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18%. Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020, penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 818.568 ribu Jiwa. Sementara itu rasio jenis kelamin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6% dengan perbandingan jumlah laki- laki 4.504.641 jiwa dan perempuan 4.568.868 jiwa. Sulawesi-selatan, (2021)

Jumlah penduduk di Kota Makassar berdasarkan data penduduk yang bersumber dari proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2010, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Makassar berjumlah 864.021 jiwa, terdiri dari laki-laki 427.325 jiwa dan perempuan 436.696 jiwa. Dari data jumlah penduduk dan luas wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Luas Kota Makassar adalah 77.378,64 km², sedangkan jumlah penduduknya adalah 864.021 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya menjadi 11,166 jiwa/km² (Kota Makassar Dalam Angka, 2017:56).

Pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Makassar dijalankan oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah melaksanakan pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan program KB. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, mendorong Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan program KB dan keluarga sejahtera serta meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk membangun keluarga kecil berkualitas merupakan tugas dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Makassar.

Melihat kondisi kenaikan penduduk yang masih tinggi, seharusnya suatu daerah mampu memberi pandangan yang bagus bagi masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat terkait tentang program pembangunan dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk agar suatu daerah tersebut mempunyai pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Partisipasi partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Selain dari faktor masyarakat, yang menimbulkan permasalahan adalah kurangnya kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kota Makassar. Menurut Winarno (2013:19), Partisipasi masyarakat adalah wahana pengembangan warga negara yang demokratis yang berfungsi dalam mendorong warga negara untuk berperan serta dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam berinteraksi, mempengaruhi proses-proses pemerintahan dan berperan aktif dalam setiap kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah program keluarga berencana

METODE

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu model penelitian yang berusaha membuat gambaran/paparan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan penyusunan hipotesis. Pendekatan yang dianut pada penelitian ini adalah pendekatan emik dan etik. Dengan pendekatan emik, konsekuensinya peneliti mencatat apa saja yang dilakukan dan diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan program keluarga berencana. Dengan pendekatan etik, peneliti bermaksud menelaah kebenaran ataupun justifikasi ilmiah dari partisipasi Masyarakat yang terjadi dengan disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, informan penelitian yang telah ditentukan memiliki peranan dalam proses Strategi. Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut: Informan Kunci (Key Informan), Informan kunci dalam penelitian ini yaitu kepala dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Informan Biasa, Informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam wilayah kerja dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan memenuhi kriteria serta pengambilan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling* dimana informan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti serta jumlah informan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Adapun kriteria informan penelitian yaitu : Bersedia dijadikan sebagai informan dan Ibu-ibu yang telah melakukan KB. Informan Pendukung, Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu kepala bidang Pengendalian dan Kasubag perencanaan Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh yakni data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah

subyek dari mana data tersebut diperoleh. Teknik Pengumpulan data menurut Moleong (2009:241), merupakan prosedur yang sistematis dan juga standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengkoordinasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan mendapatkan pola, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal penting yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta karena sosialisasi yang menjadi penentu keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat keberhasilan dari program keluarga berencana maka Dinas DPPKB melakukan penyuluhan, dan sosialisasi sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya Keluarga Berencana dan merencanakan khususnya yang sudah menikah.

Sesui dengan wawancara oleh informan YU berikut:

“Kita melakukan sosialisasi mengenai program keluarga berencana ini supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program dengan tujuan meningkatkan akseptor (pengguna keluarga berencana) baru melalui sosialisasi yang kita lakukan”. (YU 9 April 2022)

Sosialisasi dilakukan oleh DPPKB bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya program keluarga berencana dan meningkatkan pengguna Keluarga Berencana baru. Lebih lanjut sesuai dengan wawancara oleh informan YU berikut :

“Untuk sosialisasinya kita itu lakukan berbagai cara seperti kelompok dan individu, kalau kelompok itu misalnya kita mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi dan jika individu itu kita lakukan dengan mendatangi rumah-rumahnya warga satu persatu (door to door) dan kemudian kita berikan mi pemahaman mengenai Keluarga Berencana”. (YU 25 April 2022)

Berdasarkan wawancara maka diketahui metode yang dilakukan untuk sosialisasi itu dengan cara kelompok atau individu, kelompok seperti mereka diberikan fasilitas tempat dan dibuatkan forum kemudian mereka diundang dan kemudian disitu kita memberikan materi atau edukasi mengenai program keluarga berencana ini, lalu individu itu seperti datang secara langsung kepada masyarakat. Hal ini senada dengan wawancara informan R :

“kita sadar jika memang keluarga berencana ini penting yah saling membantu saja pemerintah memberikan kita pelayanan buat kita dan kita juga ikut, tujuannya kan untuk membatasi anak yah kita dukung dan ikut berpartisipasi apalagi kan kita ini tinggal dikota tidak punya lahan yang luas kalau anak banyak kan kita juga tidak tau nanti mereka mau tinggal dimana”. (R 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa Masyarakat sadar mengenai pentingnya berkeluarga Berencana sehingga mereka memanfaatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk berpartisipasi karena masyarakat paham jika memiliki banyak anak di lahan terbatas maka nantinya tidak akan ada tempat untuk anak-anaknya kelak.

Sesui dengan wawancara oleh informan MR berikut :

“Untuk sosialisasi itu kita dibantu oleh pihak keluarga berencana mereka memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat betapa pentingnya ini keluarga berencana dalam membatasi jumlah penduduk dengan tentunya membatasi jumlah anak, diberikan juga pemahaman mengenai bahayanya pernikahan dini”.(MR 25 April 2022).

Sosialisasi program keluarga berencana ini bukan hanya DPPKB yang melakukan tapi dibantu oleh plkeluarga berencana (petugas lapangan keluarga berencana) dilakukan dengan

memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai pentingnya program Keluarga Berencana sebagai upaya membatasi jumlah penduduk dan jumlah anak, dan masyarakat juga diberi pemahaman agar tidak terjadinya pernikahan dibawah umur. Sesuai dengan wawancara oleh informan MA berikut :

“yang kita lakukan itu, mereka diajak ikut dalam program Keluarga Berencana lagi pula sebenarnya mereka sudah tidak asing lagi sama ini apa-apa (keluarga berencana) karena ini sudah ada mi dri lama hanya saja yah kita dari dinas dan upt selalu dan tetap untuk mengajak mereka di kasikan edukasi bahwa penting sekali untuk berKeluarga berencana ”.(MA 25 April 2022)

Hal yang dilakukan saat sosialisai itu, mengajak masyarakat untuk program keluarga berencana memberikan mereka pemahaman lebih mendalam mengenai program Keluarga berencana . Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui apa itu Keluarga Berencana hanya saja yang mereka ketahui masih dasar-dasarnya belum secara mendalam, maka dari itu DPPKB dan UPT yang terkait selalu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat mengenai pentingnya untuk berkeluarga berencana. Hal ini sesuai yang dikatakan wawancara informan S bahwa:

“Arti keluarga berencana menurutku itu adalah cara untuk mengatur angka kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk supaya tidak padat penduduk”. (S 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa arti Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur angka kelahiran anak dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi kepadatan penduduk disuatu daerah. Hal ini juga disampaikan oleh wawancara informan N :

“Saya ikut keluarga berencana dek, karena saya sadar juga pendidikan itu sekarang mahal belum lagi kita ini kan yah bisa dibilang pas-pas an hidupnya, terus kalau anak juga banyak terus jarak kelahirannya tidak terkendali kan jadi susah juga dek kita harus membiayai banyak ana k itu susah sekali dek makanya kami sepakat untuk berKeluarga berencana setidaknya kalau 2 ji anakta lebih bisa ki mengatur keuangan dan waktu untuk mengurus anak-anak”. (N 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara yang disampaikan di atas alasan Pasangan Usia Subur (PUS) berkeluarga berencana karena pendidikan saat ini mahal jika pasangan usia subur memiliki anak yang banyak serta jarak kelahirannya tidak terkendali maka akan sulit untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarga sehingga mereka memutuskan untuk membatasi jumlah anaknya dengan berkeluarga berencana.

Program KB merupakan program pengendalian penduduk dengan membatasi kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi. Sehingga DPPKB merumuskan program utama yaitu program pelayanan keluarga berencana : Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. Pelayanan konseling KB. Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dan peralatan medis, Pelayanan KB medis operasi. Promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, Operasional balai penyuluhan KB, Penyediaan bahan dan alat pendukung pelayanan KB, Pelayanan KB keliling/mobile, Penyuluhan KB. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB : Pelayanan KIE, Peningkatan advokasi masyarakat melalui media, Pembinaan lorong KB, Pembinaan kampung KB

Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah usaha memengaruhi pola perkembangan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Berikut ini kutipan wawancara informan MR kepala bidang pengendalian penduduk mengenai pelaksanaan strategi:

“Menegenai strategi dinas pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana di kota Makassar itu di dinas yang dibagi menjadi 4 (empat) bidang yang

tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. kalau bidang pengendalian penduduk itu mengenai pengendalian laju pertumbuhan penduduknya, kalau masalah pelayanan itu di bidang Keluarga Berencana, berbicara masalah advokasinya ada di bidang penggerakan". (MR 4 April 2022)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada 4 (empat) bidang yang saling terkait satu sama lain, yakni bidang keluarga berencana bidang penyuluhan penggerak, bidang pengendalian penduduk dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang masing-masing memiliki tupoksi dalam menjalankan strategi pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini didukung oleh wawancara informan A yang menyatakan bahwa:

"Iya untuk strategi semua bidang ini masing-masing memiliki program dan masing-masing memiliki kegiatan. Strategikan di dinas pengendalian penduduk ini ada beberapa program untuk menurunkan angka kelahiran, untuk meningkatkan peserta Keluarga Berencana". (A 4 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) bidang yang saling terkait ini memiliki program kerja serta kegiatan tersendiri yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran, dan meningkatkan peserta Keluarga Berencana. Hal ini sejalan dengan wawancara informan AK yang mengatakan bahwa:

"Di bidang pengendalian penduduk itu sendiri berbicara mengenai angka kelahiran, peserta Keluarga Berencana, dan capaiannya dibidang pengendalian penduduk itu adalah evaluasi dari semua bidang. Yang bergerak itu dibidang penggerakan karena disitukomunikasi, informasi dan edukasinya, advokasinya dan penggerakannya. Kemudian yang melaksanakan penggerakannya yaitu bidang Keluarga Berencana". (AK 7 April 2022)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa, di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki pembagian program kerja berdasarkan bidang masing masing. Bidang pengendalian pendudukkeluarga berencana erfokus pada angka seperti angka kelahiran, peserta Keluarga Berencana dan capaiannya merupakan hasil evaluasi dari semua bidang. Di bidang penyuluhan dan penggerakan bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bagian penyuluhan dan pergerakan karena Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dan advokasinya. Bidang Keluarga Berencana bertugas untuk pelayanan pelaksanaan keluarga berencana termasuk pengendalian dan pendistribudian alkon, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga Berencana. Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertugas sebagai pemberdayaan keluarga sejahtera, pembiayaan ketahanan balita, anak, remaja dan lansia.

Lebih lanjut wawancara oleh informan AK sebagai berikut:

"Jika berbicara mengenai strateginya itu ada 3 program utama dalam pengendalian penduduk yaitu program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program peningkatan pemberdayaan keluarga itu strateginya". (AK 7 April 2022)

Sesui dengan wawancara bahwa strategi dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk memiliki 3 program utama yaitu program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program peningkatan pemberdayaan keluarga tentu itu dilaksanakan oleh sesuai bidang yang terkait. Hal ini selaras dengan wawancara oleh informan YU sebagai berikut:

"Misalnya program pengendalian penduduk ada beberapa kegiatan didalamnya pertama pengadaan dan pemamfaatan grand desain, koordinasi dengan sekolah siaga kependudukan, sarahsehan, pengolahan data dan informasi dan laju pertumbuhan penduduk. Kalau program keluarga berencana yaitu pelayanan dikampung Keluarga Berencana pengindistribusian alat kontrasepsi dan pelayanan jaminan kesehatan". (YU 9 April 2022)

Berdasarkan wawancara bahwa program utama seperti program pengendalian penduduk memiliki beberapa kegiatan didalamnya yaitu pengadaan dan pemamfaatan grand desain, koordinasi dengan sekolah siaga kependudukan sarasehan, pengolahan data dan informasi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan program keluarga berencana memiliki kegiatan yaitu pelayanan kampung Keluarga Berencana, pengindistribusian alat kontrasepsi,

dan pelayanan jamanian kesehatan. Hal ini sejalan dengan wawancara oleh informan MA sebagai berikut:

“Itulah strategi pelaksanaan pengendalian penduduk melaksanakan pelayanan Keluarga berencana, pembinaan keluarga, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi serta elaksanakan advokasi, kita melaksanakan evaluasi dan monitoring”.
(MA 25 April 2022)

Berdasarkan wawancara bahwa strategi dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk itu adalah pelaksanaan pelayanan Keluarga berencana, pembinaan keluarga, melaksanakankomunikasi, informasi dan edukasi , melaksanakan advokasi, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring terkait dengan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Makassar.

SIMPULAN DAN SARAN

Strategi Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga Berencana di Kota Makassar maka disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Program oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada program pelayanan keluarga berencana berjalan cukup baik hanya saja ada beberapa hambatan apalagi pada saat ini di masa *pandemic* adanya pembatasan sehingga pelayanan tidak maksimal. Sosialisai program KB dinilai cukup berhasil karena berdasarkan data Akseptor saat ini mencapai 68% yang telah ber KB, adapun sekitar 32 % Pasangan Usia Subur lainnya yang belum berKB karena sedang hamil.

Berdasarkan kesimpulan mengenai strategi Pelaksanaan Program dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Makassar disampaikan saran-saran sebagai berikut: Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pelayanan KB sehingga masyarakat dapat paham lebih mendalam mengenai pentingnya KB.

REFERENSI

- Abidin, and Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. jakarta: salemba humanika.
- Amirullah. 2015. *Pengantar Menejemen*. jakarta: mitra wacana media.
- Arum, Dyah Noviawati, Setya, and Sujiatini. 2013. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- David, Fred R. 2013. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dwiningrum, Astuti, and Siti Irene. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamdi, and Muclis. 2014. *Kebijakan Publik,Proses,Analisis,Dan Partisipasi*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Handayani, and Sabtutik. 2016. *Manajemen Strategis*. Surakarta: Program Pascasarjana.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- J. Salusu . 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Grasindo.
- Kurnia, Adi. 2020. “Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam Perspektif Manajemen Strategis (Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya).” 7: 268–76.
- Mulyadi. 2014. *Akuntansi Biaya*. 5th ed. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada.
- Nuraeni, Ina, M Rijal Amirulloh, and Dine Meigawati. 2021. “Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat Mengenai Program

- Keluarga Berencana Di Kota Sukabumi.” 5: 277–85.
- Purnomo, Eko. 2017. “Department of Communication Studies Faculty of Social and Political Sciences University of Riau.” 4(1): 1–15.
- Riskiyono, Joko. 2017. *Pe-Ngaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang Undang*. Depok: Nadi Pustaka.
- Rivai, Abdul, and Darsono Prawinegoro. 2015. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rodliyah. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Ainur. 2012. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Dan Demokrasi*. Jakarta: Program Sekolah Demokrasi.
- Subarsono, Agustinus. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Susanto, Tulus, Heru Ribawanto, and Abdul Wachid. 2015. “STRATEGI Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar) Tulus Susanto, Heru Ribawanto, Abdul Wachid.” 3(12): 1986–91.
- Thompson, Arthur, Margaret Peteraf, and John A Gamble. 2014. *Crafting and Executing Strategy 19 Th Edition*. Mc Graw Hill Education.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktik*. Yogyakarta: Rajawali.
- Widodo, Eko, and Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yanti, Sukma. 2021. “Strategi Pemerintah Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (Studi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Di Provinsi Jambi).”
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah
- www.bps.go.id, *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971- 1980- 1990- 1995- 2000 dan 2010*,
- Widjadjadi, 2016. Hadiah Rp1,5 Juta Untuk Peserta KB Pria. https://mediaindonesia.com/read/detail/79083-hadiah-rp1-5-juta-untuk_peserta-kbpria, <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlahpenduduk.html>

- Selamat Menulis -

Sekretariat Redaksi Jurnal

Indonesian Journal of Analysis Public Policy and Innovation (IJAPPI), Publisher: ITBA Al Gazali Barro

Alamat (address): Jl. Jend. Sudirman No. 41 Sumpang Binangae Kabupaten Barro, Sulawesi Selatan, Indonesia